



SOSIALISASI HAKI DI SMK NEGERI 14 MEDAN MENUJU VOKASI INOVATIF DAN SADAR HUKUM

SOCIALISATION OF HAKI AT SMK NEGERI 14 MEDAN TOWARDS INNOVATIVE AND LAW-AWARE VOCATIONS

Lily Maryam Nasution¹, Yessi Kurnia Arjani Manik², Rika Githamala Ginting², Fauzan Ghafur¹, Gatot Teguh Arifyanto*²

¹Administrasi bisni, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia.

²Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia.

*Corresponden Email: gatotteguh@polmed.ac.id.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
Revised
Accepted
Available online

Kata Kunci:

HaKI, pendidikan vokasi, perlindungan karya, literasi hukum

Keywords:

HaKI, vocational education, work protection, legal literacy

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di SMK Negeri 14 Medan bertujuan untuk meningkatkan literasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di kalangan siswa sebagai upaya membangun budaya inovasi yang sadar hukum di lingkungan pendidikan vokasi. Berdasarkan observasi awal dan wawancara, ditemukan bahwa mayoritas siswa belum memahami konsep dasar HaKI dan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait perlindungan karya. Melalui pendekatan edukatif berbasis kebutuhan, kegiatan ini menyelenggarakan sosialisasi interaktif, studi kasus, dan simulasi pendaftaran HaKI yang mampu mengubah

persepsi siswa terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya orisinal. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif pihak sekolah dalam merencanakan pembentukan Unit HaKI Sekolah sebagai bentuk keberlanjutan program. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya HaKI dalam kehidupan akademik dan profesional mereka. PKM ini membuktikan bahwa pendidikan hukum dalam bentuk yang aplikatif dapat diterima dengan baik oleh siswa SMK dan memberikan dampak positif terhadap sikap serta pemahaman mereka terhadap nilai-nilai orisinalitas dan legalitas karya.

ABSTRACT

The community service activity (PKM) conducted at SMK Negeri 14 Medan aims to improve the literacy of Intellectual Property Rights (HaKI) among students as an effort to build a culture of innovation that is aware of the law in the vocational education environment. Based on initial observations and interviews, it was found that the majority of students do not understand the basic concepts of HaKI and have never received training related to work protection. Through a needs-based educational approach, this activity organises interactive socialisation, case studies, and HaKI registration simulations that are able to change students' perceptions of the importance of legal protection of original works. In addition, this activity also encouraged active participation of the

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Elfarazy Media Publisher



school in planning the formation of the School HaKI Unit as a form of programme sustainability. The results showed an increase in students' awareness of the importance of HaKI in their academic and professional lives. This PKM proves that legal education in an applicable form can be well received by SMK students and has a positive impact on their attitude and understanding of the values of originality and legality of work.

PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi memainkan peran strategis dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital dan ekonomi berbasis kreativitas. Di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didorong untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap inovasi dan mampu menciptakan karya orisinal yang memiliki nilai ekonomi (Ahmadi & Ibda, 2018). Namun demikian, kemampuan siswa dalam memahami pentingnya perlindungan karya melalui Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) masih tergolong rendah, baik dalam aspek konseptual maupun procedural (Adhi, 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi HaKI belum menjadi bagian integral dari kurikulum vokasi di Indonesia, terutama di SMK. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti bahwa ketidakhadiran pendidikan hukum terapan di SMK menyebabkan tingginya kerentanan terhadap eksploitasi ide kreatif siswa (Nurmalina, 2018). Sementara itu, penelitian (Wala & Wala, 2025) di SMK Tata Busana menemukan bahwa sebagian besar guru dan siswa tidak memahami bahwa desain atau produk siswa dapat dilindungi secara hukum, bahkan sejak proses pembuatannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Mahande, 2023) yang menyatakan bahwa hanya 18% siswa SMK yang mengetahui definisi dasar HaKI, dan lebih sedikit lagi yang mengetahui cara pendaftarannya.

Kondisi ini menunjukkan adanya gap besar antara kapasitas siswa untuk berinovasi dengan kemampuan mereka dalam melindungi hasil ciptaannya. Padahal, di tingkat global, perlindungan kekayaan intelektual telah terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan perlindungan moral pencipta (*The Digital Transformation of SMEs*, 2021), Negara-negara seperti Korea Selatan dan Finlandia bahkan telah mengintegrasikan pendidikan HaKI sejak pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari strategi penguatan inovasi nasional. Sayangnya, literasi HaKI di Indonesia masih bersifat insidental dan belum menjadi budaya sekolah yang mapan.

Beberapa upaya penguatan telah dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi, namun mayoritas hanya bersifat jangka pendek dan tidak memiliki keberlanjutan structural. Studi kasus pada SMK Negeri 14 Medan yang menjadi mitra kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sekolah ini memiliki banyak karya siswa dalam bidang desain bangunan, aplikasi, dan media promosi digital, namun belum pernah mendaftarkan satupun karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena minimnya informasi dan pendampingan. Di sisi lain, belum adanya Unit HaKI Sekolah juga mengakibatkan kurangnya advokasi terhadap hak-hak siswa dan guru dalam bidang kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang mampu memberikan edukasi praktis dan aplikatif tentang HaKI kepada siswa SMK secara langsung. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan hukum siswa, tetapi juga untuk menciptakan struktur pendukung seperti

Unit HaKI Sekolah sebagai pusat literasi, advokasi, dan keberlanjutan inovasi. Keunikan pendekatan ini terletak pada integrasi antara pendidikan vokasi, kesadaran hukum, dan strategi keberlanjutan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) kepada siswa-siswi SMK Negeri 14 Medan. Lokasi kegiatan dipilih secara purposive di SMK Negeri 14 Medan, Jalan Karya Dalam No. 26, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara, dengan dasar temuan awal bahwa literasi hukum di kalangan siswa sangat rendah dan belum terdapat unit resmi yang mengadvokasi pendaftaran HaKI. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, observasi langsung terhadap fasilitas dan lingkungan sekolah, serta wawancara semi-terstruktur dengan wakil kepala sekolah, guru pembimbing, dan perwakilan siswa untuk menggali persepsi serta pengalaman mereka terhadap perlindungan hukum atas karya. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi edukatif yang bersifat need-based, agar relevan dengan konteks keahlian dan pemahaman peserta. Intervensi dilakukan dalam bentuk seminar interaktif, diskusi kasus, dan simulasi teknis pendaftaran HaKI secara daring. Evaluasi keberhasilan program dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman siswa, serta survei kepuasan untuk mengukur respons terhadap metode pelaksanaan. Data dianalisis secara tematik dengan menyoroti perubahan pengetahuan, tingkat partisipasi aktif, serta potensi keberlanjutan program melalui pembentukan Unit HaKI Sekolah. Metode ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pengabdian hukum yang menekankan dialog kritis, literasi regulasi, dan pemberdayaan lokal dalam konteks pendidikan vokasi (Amirulloh et al., 2022; Handayani et al., 2020; Sinal et al., 2023)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Transformasi Pemahaman Siswa terhadap HaKI di Lingkungan Pendidikan Vokasi

Salah satu dampak paling mencolok dari pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Negeri 14 Medan adalah terjadinya perubahan mendalam dalam pola pikir siswa terkait pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual. Sebelum kegiatan ini berlangsung, mayoritas siswa menganggap bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah urusan pelaku industri besar atau individu yang telah sukses secara finansial dan mapan di dunia usaha. Pandangan ini tidak muncul begitu saja, melainkan sejalan dengan hasil penelitian (Puspitasari et al., 2025), yang menunjukkan bahwa literasi HaKI di kalangan pelajar vokasional umumnya masih rendah akibat belum terintegrasinya materi ini secara sistematis dalam kurikulum sekolah kejuruan.

Namun, seiring berjalannya program dan keterlibatan aktif siswa dalam berbagai sesi interaktif seperti diskusi berbasis studi kasus nyata serta simulasi langsung proses pendaftaran HaKI terjadi pergeseran perspektif yang signifikan. Para siswa mulai menyadari bahwa karya-karya yang mereka hasilkan, seperti desain grafis, aplikasi Android, hingga proyek konstruksi mini, bukan sekadar tugas sekolah biasa. Mereka

memahami bahwa karya-karya ini merupakan bentuk ekspresi intelektual yang memiliki nilai ekonomis, legalitas hukum, dan bahkan potensi komersialisasi.

1) Pengalaman Langsung sebagai Pemantik Kesadaran Hukum

Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam program ini menekankan prinsip *learning by doing*, yang terbukti jauh lebih efektif daripada metode ceramah satu arah yang bersifat pasif. Dengan terlibat secara langsung dalam proses identifikasi karya, pengisian dokumen pendaftaran, hingga simulasi pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, siswa mendapatkan pengalaman konkret yang membentuk pemahaman mendalam. Mereka tidak lagi melihat HaKI sebagai konsep hukum yang abstrak, melainkan sebagai bagian dari realitas profesional yang relevan dengan masa depan mereka.

Hal ini memperkuat temuan (Oktaviarni et al., 2021), yang menegaskan bahwa pengalaman langsung dalam konteks dunia nyata merupakan faktor kunci dalam membentuk kesadaran hukum siswa SMK. Sementara itu, penelitian (Amirulloh et al., 2022) turut menambahkan bahwa keterkaitan antara materi hukum dan praktik kejuruan mempercepat pemahaman siswa terhadap konsep legalitas. Dalam konteks kegiatan ini, integrasi antara teori dan praktik menjadikan materi HaKI tidak hanya mudah dicerna, tetapi juga langsung dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik.

2) Membangun Budaya Orisinalitas dan Etika Penciptaan

Lebih dari sekadar pengetahuan teknis, kegiatan ini telah menanamkan benih kesadaran kolektif akan pentingnya menghargai orisinalitas dan menjunjung tinggi etika dalam berkarya. Para siswa mulai aktif membicarakan isu-isu seputar perlindungan karya dalam forum kelas, kelompok belajar, bahkan menjadikannya sebagai topik proyek pribadi yang ingin mereka kembangkan lebih lanjut. Perubahan ini menunjukkan tumbuhnya budaya baru di lingkungan sekolah: budaya yang mengapresiasi hasil karya bukan hanya dari sisi estetika atau fungsinya, tetapi juga dari nilai hak dan tanggung jawab hukum yang menyertainya.

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Wala & Wala, 2025) yang menegaskan bahwa pendidikan vokasional yang dipadukan dengan penguatan regulasi kekayaan intelektual mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki integritas hukum dan kesadaran etis sebagai pencipta. HaKI dalam konteks ini bukan hanya alat perlindungan, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial.

3) Dukungan Struktural: Fondasi bagi Keberlanjutan Literasi HaKI

Meski transformasi mental dan budaya telah mulai terbentuk, perubahan ini tidak akan bertahan lama tanpa dukungan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan jangka panjang yang mulai diwujudkan adalah kesepakatan bersama antara pihak sekolah, guru, dan tim PKM untuk membentuk Unit HaKI Sekolah. Unit ini akan menjadi struktur permanen yang berfungsi sebagai pusat informasi, bimbingan teknis, serta fasilitator dalam proses pendaftaran karya siswa ke lembaga terkait.

Inisiatif ini sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian (Khomsah et al., 2025), yang menyimpulkan bahwa kehadiran unit khusus di sekolah mampu memperkuat ekosistem inovasi sekaligus menjamin keberlangsungan program literasi HaKI sebagai bagian dari budaya sekolah. Dengan adanya lembaga internal ini, siswa tidak lagi berjalan sendiri. Mereka memiliki tempat untuk bertanya, ruang untuk berkonsultasi, dan dukungan nyata untuk menindaklanjuti perlindungan hukum atas karya mereka.

Transformasi yang terjadi di SMK Negeri 14 Medan membuktikan bahwa perubahan tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar ia bisa tumbuh dari ruang kelas, diskusi kecil, hingga pengalaman langsung yang menyentuh logika dan perasaan siswa. Dengan pendekatan yang menyeluruh, humanis, dan berbasis praktik, program ini berhasil menyalakan kesadaran baru: bahwa setiap ide dan karya siswa adalah aset yang layak dihargai, dilindungi, dan dikembangkan.

Melalui penguatan edukasi, dukungan struktural, dan penanaman budaya hukum sejak dini, SMK Negeri 14 Medan kini berada di jalur yang tepat menuju ekosistem pendidikan vokasi yang inovatif, sadar hukum, dan berdaya saing. Inilah fondasi masa depan, tempat di mana kreativitas bertemu legalitas dan dari sana, lahirlah generasi pencipta yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab.

b. Tantangan, Solusi Strategis, dan Rencana Keberlanjutan Sosialisasi HaKI

Meski kegiatan sosialisasi HaKI di SMK Negeri 14 Medan disambut dengan antusiasme tinggi dari para siswa, pelaksanaannya turut mengungkap berbagai tantangan mendasar yang tidak bisa diabaikan, khususnya dalam aspek struktural. Salah satu temuan paling krusial adalah ketiadaan Unit HaKI Sekolah, yakni lembaga internal yang seharusnya bertugas mengelola, mencatat, serta mendampingi proses perlindungan karya-karya siswa. Ketidadaan struktur ini membuat potensi kreativitas siswa tidak terdokumentasi secara sistematis dan rentan kehilangan perlindungan hukum, bahkan ketika karya tersebut telah menunjukkan nilai inovatif dan aplikatif.

Fenomena ini memperkuat temuan Oktaviarni dan (Oktaviarni et al., 2021), yang menyoroti bahwa mayoritas SMK di Indonesia belum memiliki struktur kelembagaan yang secara khusus menangani literasi hukum, terutama dalam konteks kekayaan intelektual. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, semangat siswa untuk melindungi karya intelektualnya cenderung hanya menjadi euforia sesaat, tanpa kelanjutan yang konkret dan berdampak.

1) Tantangan Digital dan Administratif: Kerumitan yang Membatasi

Di samping persoalan kelembagaan, tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap informasi serta kompleksitas prosedur administrasi pendaftaran HaKI. Proses pendaftaran yang kini terintegrasi secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebenarnya dirancang untuk efisiensi. Namun, bagi sebagian besar siswa dan guru yang belum familiar dengan layanan hukum berbasis digital, sistem ini justru menjadi penghalang baru. Antarmuka yang tidak ramah pengguna, istilah-istilah hukum yang teknis, dan minimnya panduan operasional menjadi hambatan nyata dalam mendorong partisipasi aktif dari komunitas sekolah.

(LITERASI DIGITAL PADA SISWA, n.d.) menemukan bahwa siswa SMK memerlukan peningkatan keterampilan literasi digital agar dapat memanfaatkan media digital secara optimal dalam pembelajaran dan komunikasi, yang secara implisit berdampak pada kemampuan mereka mengakses layanan publik daring. Dalam konteks tersebut, pendekatan edukatif berbasis simulasi dan praktik langsung menjadi langkah strategis. Siswa tidak hanya diajak memahami teori, tetapi juga dilatih secara teknis dan taktis dalam menghadapi prosedur legal secara mandiri sebuah keterampilan yang sangat relevan dalam dunia kerja masa depan yang serba digital.

2) Inisiasi Unit HaKI Sekolah: Pilar Literasi yang Berkelanjutan

Sebagai bagian dari langkah berkelanjutan, tim pelaksana PKM mendorong terbentuknya Unit HaKI Sekolah yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi ruang edukatif dan kolaboratif bagi warga sekolah. Unit ini diharapkan berperan sebagai pusat informasi, ruang konsultasi, dan wahana pengembangan karya siswa menjadi penghubung antara kreativitas dan legalitas.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran (Adhi, 2023), yang menegaskan bahwa literasi hukum hanya akan berkembang secara berkelanjutan apabila ditopang oleh struktur kelembagaan yang kuat. Dalam hal ini, komitmen kepala sekolah dan guru pembimbing menjadi titik tolak yang krusial. Tanpa dukungan nyata dari pihak manajemen sekolah, HaKI akan tetap menjadi isu marjinal, bukan bagian dari sistem pembelajaran yang melekat dalam keseharian akademik.

3) Digitalisasi Sebagai Ruang Promosi dan Apresiasi Karya Siswa

Lebih jauh lagi, kegiatan ini membuka peluang baru yang menjanjikan, yaitu pemanfaatan media digital sekolah sebagai sarana dokumentasi, promosi, dan penguatan identitas inovatif sekolah. Melalui platform seperti Instagram sekolah, laman resmi, hingga kanal YouTube, karya-karya siswa yang telah mendapatkan perlindungan HaKI dapat diperkenalkan ke publik. Tidak hanya menciptakan kebanggaan tersendiri bagi siswa, langkah ini juga dapat memperkuat citra sekolah sebagai institusi vokasi yang inovatif, kreatif, dan sadar hukum.

Gagasan ini mendapat dukungan dari ungkapan bahwa media digital berperan besar dalam membangun literasi hukum dan ekosistem ekonomi kreatif di kalangan pelajar generasi Z (Vasilyeva, 2021). Dengan strategi ini, potensi sinergi antara dunia pendidikan, industri kreatif lokal, dan masyarakat luas semakin terbuka lebar. Digitalisasi karya juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan teknologi informasi, keterampilan vokasional, dan kesadaran hukum dalam satu gerakan pembelajaran yang utuh.

4) Kolaborasi sebagai Kunci Ekosistem Vokasi yang Tangguh

Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, kolaborasi antarsektor menjadi faktor penentu. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari perguruan tinggi, lembaga layanan hukum, komunitas kreatif, hingga pemerintah daerah dibutuhkan untuk membangun ekosistem pendidikan vokasi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Kolaborasi ini bukan hanya dalam bentuk pelatihan atau bimbingan, tetapi juga dalam

penyusunan kebijakan, pendampingan pengajuan HaKI, dan pembukaan akses ke pasar karya siswa.

Dengan pendekatan holistik seperti ini, SMK Negeri 14 Medan tidak hanya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang ada, tetapi juga tampil sebagai model ideal pendidikan vokasional yang menyatukan kreativitas, hukum, dan teknologi. Inilah wajah baru pendidikan kejuruan Indonesia yang tidak sekadar mempersiapkan tenaga kerja, tetapi juga mencetak pencipta dan pelindung karya yang berdaya guna di era digital

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Negeri 14 Medan menjadi bukti nyata bahwa sosialisasi dan edukasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sangat relevan dan mendesak untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan vokasi. Melalui pendekatan yang partisipatif dan sesuai dengan konteks keseharian siswa, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru dalam diri para pelajar – bahwa karya mereka, sekecil apa pun, pantas untuk dilindungi. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa isu-isu hukum seperti HaKI sebenarnya dapat dipahami dan diterapkan oleh siswa tingkat menengah, asalkan disampaikan dengan cara yang tepat, kontekstual, dan menyentuh pengalaman mereka secara langsung. Ini merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya budaya inovatif yang sadar hukum di lingkungan sekolah.

Namun, transformasi yang telah dimulai ini tidak bisa berjalan sendiri. Keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan sinergi antar pihak. Pembentukan Unit HaKI Sekolah adalah langkah strategis yang tak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan pendampingan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan kreatif yang terstruktur dan berkelanjutan. Lebih dari itu, kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi vokasi seperti Politeknik Negeri Medan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan sekolah dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual nasional. Dengan kerja sama yang solid, terbuka, dan berorientasi jangka panjang, pendidikan vokasi di Indonesia berpeluang besar melahirkan generasi pencipta yang tidak hanya inovatif dan produktif, tetapi juga sadar akan nilai hukum dan ekonomi dari setiap ide yang mereka hasilkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada SMK Negeri 14 Medan atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Sekolah, guru pembimbing, serta siswa-siswi yang antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Apresiasi diberikan kepada Politeknik Negeri Medan atas dukungan akademik dan administratif. Kolaborasi seluruh pihak telah memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberi dampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, Y. P. (2023). *Pengelolaan Kekayaan Intelektual*.

Ahmadi, F., & Ibda, H. (2018). *Media literasi sekolah: Teori dan praktik*. CV. Pilar Nusantara.

Khomsah, N. L., Syahri, M., & Tinus, A. (2025). Strengthening Link and Match 8+ i Program in Vocational Education. *Academia Open*, 10(1), 10–21070.

LITERASI DIGITAL PADA SISWA. (n.d.).

Mahande, I. R. D. (2023). *Pengantar Pendidikan Kejuruan*. Indonesia Emas Group.

Puspitasari, M. D., Oktaria, D. S., Winjaya, F., Iswanto, A. P., & Tyas, A. (2025). *PENGENALAN FASILITAS OPERASI PERKERETAAPIAN GUNA MENINGKATKAN PENGETAHUAN SISWA SMK DI BIDANG PERKERETAAPIAN*.

Jurnal Ilmiah offline:

Amirulloh, M., Muchtar, H. N., & Saleh, K. A. (2022). Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru dan Siswa SMKN 4 Kuningan Jawa Barat. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 229–237.

Handayani, I., Lutfiani, N., & Kristanti, C. Y. (2020). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Berbasis Web Pada Universitas Raharja. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 17(1), 85–94.

Nurmalina, N. (2018). Media social literacy in Indonesian language teaching/learning at vocational high school. *Proceedings of the International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology - ICESST 2018*, 574–580. <https://doi.org/10.29210/2018184>

Oktaviarni, F., Suryahartati, D., Windarto, W., Idris, I., & Arsyad, A. (2021). Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhammadiyah Singkut. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 34–42.

Sinal, M., Muqit, A., Himmah, D. R., & Sukadi, I. (2023). Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 184–200.

The Digital Transformation of SMEs. (2021). OECD. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>

Vasilyeva, O. A. (2021). *Influence of Digitalization on Cognitive and Social Orientations of Generation Z* (pp. 1279–1289). https://doi.org/10.1007/978-3-030-56433-9_134

Wala, G. N., & Wala, A. N. (2025). Analisis Kebutuhan Literasi Hukum dalam Kurikulum SMK Jurusan Tata Busana: Studi Kasus Perlindungan Desain dan Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 3(2), 88–97.